

kt

Per 02 123

Sis

F

SKRIPSI

AGUS SUSRIYANTO

**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA
BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

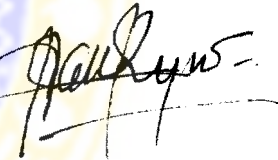
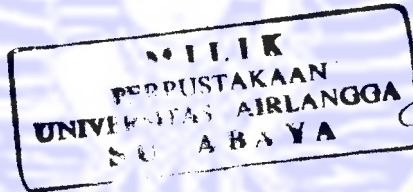
**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA
BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Agus Susriyanto
NIM. 039914779

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa perkawinan antar agama menurut hukum Islam adalah dilarang. Hal ini sesuai dengan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan antar agama.
- 2) Menurut pandangan hukum Islam, perkawinan antar agama itu menimbulkan pendapat-pendapat dari beberapa golongan, yaitu :
 - a) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 dan surat Al Mumtahanah ayat 10 jelas hukumnya adalah haram.
 - b) Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu :
 1. golongan yang menghalalkan;
 2. golongan yang mengharamkan;
 3. golongan yang menghalalkan tapi siasat tidak menghendaki.

- c) Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 dan kesepakatan para ulama tentang larangan perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, maka hukumnya adalah haram.

Sedangkan menurut pendapat saya sendiri bahwa sesungguhnya perkawinan antar agama itu tetap dilarang, jika laki-laknya muslim dan wanitanya musyrik, sesuai dengan Al Baqarah : 221. Akan tetapi, jika wanitanya ahli kitab tetap diperbolehkan, sesuai dengan Al Maidah : 5. Jadi kita sebagai umat muslim tidaklah harus menafsirkan apa yang diatur dalam Al Qur'an secara tekstual tapi secara kontekstual. Karena sesungguhnya apa yang diatur Allah SWT dalam Al Qur'an itu sudah seadil-adilnya bagi umat-Nya.

- 3) Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkawinan antar agama antara lain :

Pertama, mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar agama sampai sekarang belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antar agama maka tidak perlu jika salah satu pihak pura-pura beralih agama hanya sekedar untuk bisa melaksanakan perkawinan, karena perkawinan itu masih bisa dilaksanakan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilaksanakan.

- 4) Dari perkawinan antar agama itu tentulah akan menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti akibat hukum terhadap perkawinan antar agama itu sendiri dan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pasangan beda agama tersebut.

2. Saran

Adapun saran-saran yang bisa saya berikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar agama, maka saya mengharapkan agar dapat diwujudkan segera suatu peraturan pemerintah yang mempunyai landasan hukum pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai peraturan pelaksanaan, dari instansi-instansi yang berwenang, misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri, bagi perkawinan antar agama. Dengan adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan tersebut, maka tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, terutama yang ingin melaksanakan perkawinan antar agama. Apabila selama belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang mengenai perkawinan antar agama, maka kekosongan hukum dalam hal ini dapat diisi oleh yurisprudensi.

- 2) Kenapa tiap-tiap individu yang ingin melangsungkan perkawinan antar adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar agama.
- 3) Menurut pandangan saya sendiri sebenarnya perkawinan antar agama ini bisa diterima secara logika asalkan perkawinan itu sendiri memang bertujuan ingin mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan yang dikehendaki dalam Hukum Islam. Tidak sedikit juga selebrits yang melangsungkan praktek perkawinan antar agama bisa bahagia rumah tangganya hingga saat ini.